

MONITORING DAN EVALUASI

**SURVEI PERSEPSI KORUPSI**

*TRIWULAN III*



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

2023

## **I. PENDAHULUAN**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2024 dan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya dengan melakukan survey secara berkelanjutan.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN SURVEI**

Survei Persepsi Korupsi dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper).

Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini bermaksud dan bertujuan untuk :

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **III. KESIMPULAN HASIL SURVEI**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi "99,22" atau "3,97" atau masuk pada kategori "Bersih Dari Korupsi"

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,915 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,972 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,972 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,977 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,977 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,983 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,932 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,989 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,994 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,977 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

#### **IV. REKOMENDASI ATAS HASIL SURVEI**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai periode Triwulan III Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Sangat Baik. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Prosedur, Transaksi Biaya dan Penyalahgunaan Jabataan** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Segenap warga pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dengan selalu mempedomani *Standard Operating Procedure* (SOP) dan juga selalu berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan  
Instansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

**V. TINDAK LANJUT ATAS UNSUR DENGAN NILAI TERENDAH**

Berdasarkan analisa terhadap data kuisioner Persepsi Korupsi dan telah diketahui sebagaimana di atas, unsur yang mendapatkan penilaian terendah indikator **Prosedur, Transaksi Biaya dan Penyalahgunaan Jabataan** Adapun tindak lanjut atas hasil suvei khususnya nilai terendah dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

**1. *Prosedur***

- Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah memberikan informasi kepada pengguna layanan tentang prosedur layanan secara rinci sesuai dengan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang berlaku serta mengupload prosedur berperkara tersebut di Website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

**2. *Transaksi Biaya***

- Memasang Banner standar pelayanan di ruang PTSP yang didalamnya memuat biaya dari setiap pelayanan yang ada serta mengupload biaya perkara pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan juga meletakkan besaran panjar biaya perkara tersebut pada ruang pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menciptakan transparansi dalam berperkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

**3. *Penyalahgunaan Jabatan***

- Segenap warga pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selalu berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Demikian hasil Monitoring, Evaluasi dan Tindaklanjut atas hasil pelaksanaan Survey Indeks Presepsi Anti Korupsi Triwulan III Periode 01 Juli 2023 – 30 September 2023 . Semoga kedepannya agar dapat selalu memberikan pelayanan yang prima.

Ketua

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten flourish]*

NOEITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.